

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)**

Oleh
Abu Hanifah, M.IP
NIDN 0221026601

ABSTRAK

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah diperlukan sumber-sumber keuangan yang merupakan pendapatan daerah, karena untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tersebut memerlukan biaya yang diperoleh dari sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan faktor penunjang yang berperan penting bagi pembangunan daerah, untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu Daerah diwajibkan untuk menggali sumber keuangan sendiri, terutama pada sumber pendapatan yang telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dituntut mampu menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah yang termasuk dalam PAD. Dinas Pendapatan Daerah merupakan alat Pemerintah Daerah yang diberi tanggung jawab untuk memberikan masukan keuangan daerah yang semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan baik urusan rumah tangga daerah maupun pembangunan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada penelitian ini akan dipakai penelitian kualitatif dimana kondisi obyek bersifat alamiah, kemudian data dan informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan akan dianalisis lebih lanjut oleh penulis sebagai instrumen kunci.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa terjadi peningkatan PAD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 887.877.189.418,27 dibandingkan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 619.173.437.390,00. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.

Berbagai target PAD yang ditetapkan tahun 2013 mengalami peningkatan seperti dalam sektor Pajak Daerah realisasi sebesar Rp 725.464.224.225,00 dari target Rp 683.970.800.000,00, Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp 83.992.026.667,00 dari target Rp 76.393.766.500,00, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi sebesar Rp 12.137.115.821,62 dari target Rp 11.958.810.389,00, dan terakhir Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasi sebesar Rp 66.283.822.704,65 dari target Rp 39.763.336.100,00

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dituntut mampu menggali

potensi sumber-sumber keuangan daerah yang termasuk dalam PAD. Dinas Pendapatan Daerah merupakan alat Pemerintah Daerah yang diberi tanggung jawab untuk memberikan masukan

keuangan daerah yang semaksimal mungkin dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan baik urusan rumah tangga daerah maupun pembangunan.

Jenis-jenis penerimaan yang ditargetkan pada APBD Provinsi Lampung tahun anggaran 2009-2013, khusus PAD terdiri dari :

a. Pajak Daerah :

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3PABT);
- 5) Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP).

b. Retribusi Daerah :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUAM;
- 2) Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Jiwa;
- 3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 4) Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- 5) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal;
- 6) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;

7) Retribusi Pungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK);

8) Retribusi Izin Trayek;

9) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :

- 1) PD Wahana Raharja;
- 2) PT. Bank Lampung;
- 3) PT. Sarana Lampung Ventura;
- 4) Deviden ASKRIDA.

d. Lain-lain PAD yang Sah :

- 1) Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- 2) Penerimaan Jasa Giro;
- 3) Penerimaan Bunga Deposito;
- 4) Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR);
- 5) Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Daerah;
- 6) Pendapatan Denda Pajak (PKB dan BBNKB);
- 7) Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan;
- 8) Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (SP3D);
- 9) Penerimaan Lain-lain.

Berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut sejalan dengan perkembangan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Provinsi Lampung berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan penerimaan PAD. Kondisi ini ini dapat diketahui melalui tabel berikut ini

Tabel 1. Target dan Realisasi PAD Tahun 2009 Sampai Dengan 2013

| No | Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|----|-------|-----------------|-----------------|----------------|
| 1. | 2009 | 305.117.936.425 | 422.059.081.473 | 138,33 |
| 2. | 2010 | 346.266.831.315 | 563.739.265.971 | 162,80 |
| 3. | 2011 | 512.215.692.440 | 658.531.380.887 | 128,57 |
| 4. | 2012 | 602.552.662.400 | 714.576.591.329 | 118,59 |
| 5. | 2013 | 819.173.437.390 | 945.918.152.246 | 115,47 |

Sumber : Data Dipenda Provinsi Lampung 2013

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun anggaran 2009 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 target PAD Provinsi Lampung mengalami peningkatan sebesar Rp 216.620.774.990,00 atau sebesar 35,95%. Begitu juga dengan realisasi PAD pada Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2010 mengalami peningkatan sebesar Rp 231.341.560.917,00 atau sebesar 32,37%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian target PAD dan target pendapatan Provinsi Lampung sampai dengan akhir tahun 2011 menunjukkan perkembangan penerimaan.

Terjadinya peningkatan pendapatan ini tidak terlepas dari strategi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Namun demikian sumbangan penerimaan PAD Provinsi Lampung dalam APBD masih jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan penerimaan Non PAD dari Pemerintah Pusat hanya sebesar 45,41%.

Bertolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul, “Strategi Pemerintah Provinsi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung).

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. METODE PENELITIAN

2.1 Fokus Penelitian

Menurut pendapat Sugiono (2005 : 32) bahwa, karena terlalu luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi masalah dalam satu atau lebih variabel.

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum, Berdasarkan dari pendapat tersebut maka, fokus penelitian ini adalah segala hal berkaitan dengan Strategi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berupa :

- a. Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. Ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

2.2 Sumber Data

Penelitian ini memerlukan data-data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, untuk itu ada dua jenis data yang dipakai, yaitu :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara menggali dari sumber asli secara langsung terhadap *key informan* dengan panduan daftar pertanyaan. Wawancara ini dilakukan terhadap pihak yang dianggap mengetahui strategi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengalami langsung peristiwa terkait, dan memahami permasalahan seperti Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Lampung, Sekretaris Dinas dan Kepala-kepala Bidang.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang digunakan untuk mendukung data primer, yakni melalui buku-buku, surat kabar, dan dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

2.3 Pengelolaan dan Analisis Data

Menurut Sugiono (2005 : 45), bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Selanjutnya, dalam penelitian ini dilakukan analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis dengan menggunakan kata-kata atau kalimat, dengan cara membandingkan antara teori yang relevan dengan kondisi nyata yang diperoleh dilapangan. Sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran atau diskripsi yang jelas terhadap permasalahan yang diteliti.

III. PEMBAHASAN

3.1 Intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah yang mengarah kepada prinsip-prinsip Good Governance dan peningkatan pelayanan publik serta untuk mewujudkan Provinsi Lampung yang unggul dan berdaya saing, maka upaya-upaya yang terus dilakukan antara lain, yaitu :

- a. Mengintensifikasikan sistem prosedur pungutan sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh masing-masing Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat baik melalui pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi pengelola pendapatan daerah serta berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pendapatan daerah;

d. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung telah melakukan beberapa upaya kongkrit, antara lain :

- 1) Untuk lebih mendekatkan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat maka pada tahun anggaran 2009 Dinas Pendapatan Provinsi Lampung telah membuka unit pelayanan baru melalui Kantor Samsat Pembantu di Pringsewu, Samsat Mall Chandra di Bandar Lampung, Samsat Mall Kartini di Bandar Lampung, dan Samsat Millenium di Natar;
- 2) Dalam rangka menampung aspirasi masyarakat serta penertiban administrasi kendaraan bermotor Dinas Pendapatan Provinsi Lampung telah melakukan pemberian penghapusan/pengurangan/peringatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor melalui Pemutihan PKB dan BBNKB (Pergub No.36 Tahun 2009 Tentang Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB));
- 3) Meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan dana perimbangan khususnya yang berasal dari bagi hasil seperti PBB, BPHTB, dan PPH pasal 21 dan 29 bersama-sama dengan Kanwil Pajak Bengkulu – Lampung serta Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota;
 - 4) Melakukan penyesuaian-penyeseuai dasar hukum pungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - 5) Melakukan sosialisasi, penyuluhan pembayaran PKB dan BBNKB (termasuk pemutihan), razia kendaraan bermotor baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung kepada masyarakat;
 - 6) Pemutahiran data potensi akan terus dilakukan termasuk kendaraan dump yang ada di Kabupaten/Kota namun belum di BBN;
 - 7) Terkait pengkajian dasar hukum pungutan PAD, Dinas Pendapatan Provinsi Lampung berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, telah menerbitkan beberapa Peraturan Gubernur

yang berkaitan dengan pengelolaan PAD;

- 8) Penyediaan informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui SMS Pajak dengan nomor 0819695000.

Upaya intensifikasi PAD di lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung sampai saat ini telah dikembangkan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

- a. UPTD Wilayah I Bandar Lampung;
- b. UPTD Wilayah II Metro;
- c. UPTD Wilayah III Gunung Sugih;
- d. UPTD Wilayah IV Kotabumi;
- e. UPTD Wilayah V Pringsewu.

Selain itu, untuk memudahkan pelayanan dan mendekatkan jarak para wajib pajak kendaraan bermotor sampai tahun 2009 terdapat 16 (enam belas) Kantor Bersama Samsat di Provinsi Lampung :

- a. Kantor Bersama Samsat Bandar Lampung diresmikan tahun 1979, dengan status kantor penuh/mandiri;
- b. Kantor Bersama Samsat Metro diresmikan tahun 1984, dengan status kantor penuh/mandiri;
- c. Kantor Bersama Samsat Kotabumi diresmikan tahun 1984, dengan status kantor penuh/mandiri;

- d. Kantor Bersama Samsat Kalianda diresmikan tahun 1993, dengan status kantor penuh/mandiri;
- e. Kantor Bersama Samsat Liwa diresmikan tahun 1996, dengan status kantor penuh/mandiri;
- f. Kantor Bersama Samsat Kota Agung diresmikan tahun 1999, dengan status kantor penuh/mandiri;
- g. Kantor Bersama Samsat Menggala diresmikan tahun 1999, dengan status kantor pembantu;
- h. Kantor Bersama Samsat Gunung Sugih diresmikan tahun 2000, dengan status kantor penuh/mandiri;
- i. Kantor Bersama Samsat Sukadana diresmikan tahun 2000, dengan status kantor penuh/mandiri;
- j. Kantor Bersama Samsat Blambangan Umpu diresmikan tahun 2000, dengan status kantor penuh/mandiri;
- k. Kantor Bersama Samsat Rajabasa diresmikan tahun 2003, dengan status kantor penuh/mandiri;
- l. Kantor Bersama Samsat Mall Candra Bandar Lampung diresmikan tahun 2009, dengan status kantor pembantu;
- m. Kantor Bersama Samsat Pringsewu diresmikan tahun 2009, dengan status kantor pembantu;
- n. Kantor Bersama Samsat Mall Milenium Natar diresmikan tahun 2010, dengan status kantor pembantu;
- o. Kantor Bersama Samsat Mall Kartini Bandar Lampung diresmikan tahun 2010, dengan status kantor pembantu;
- p. Kantor Bersama Samsat Kontainer Sukaraja Bandar Lampung diresmikan tahun 2010, dengan status kantor pembantu;

3.2 Ektensifikasi Pengelolaan Sumber-sumber PAD

Mencermati berbagai hal terkait dengan perkembangan penerimaan PAD Provinsi Lampung sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung menjelaskan (hasil wawancara tanggal 04 Desember 2014, bahwa kebijakan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan di Provinsi Lampung diarahkan kepada :

1. Evaluasi/penyesuaian, penyusunan, serta sosialisasi produk-produk hukum Pendapatan Daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Revitalisasi tentang peran dan fungsi kelembagaan khususnya UPTD Pajak di lingkup Dipenda Provinsi Lampung;
3. Peningkatan sarana dan prasarana Kantor bersama Samsat eksisting dalam upaya memberikan pelayanan

- yang memuaskan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor;
4. Peningkatan akses pelayanan kepada para wajib pajak kendaraan bermotor melalui pembentukan Kantor-kantor Samsat Pembantu pada lokasi-lokasi strategis maupun pengembangan keberadaan Samsat Keliling;
 5. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola Pajak Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan dan peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah;
 6. Optimalisasi proses-proses inspeksi dalam rangka peningkatan pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak daerah;
 7. Rekonsiliasi data terkait dengan optimalisasi pengelolaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, termasuk penyusunan Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
 8. Optimalisasi fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan baik dalam lingkup internal maupun eksternal terkait pengelolaan pendapatan daerah pada bidang administrasi, keuangan, dan kelembagaan/personal;

9. Optimalisasi koordinasi dalam proses pengelolaan pendapatan daerah baik dalam lingkup internal maupun eksternal;

Selain hal tersebut, menurut Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung (hasil wawancara tanggal 04 Desember 2014), Isue Strategis yang diangkat sebagai upaya peningkatan PAD Provinsi Lampung adalah :

- a. Peningkatan kualitas data dasar pendapatan daerah;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- d. Peningkatan sumber daya organisasi secara efisien dan efektif;
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Penertiban system dan prosedur pungutan pendapatan daerah;
- g. Peningkatan sosialisasi pungutan pajak.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Bertolak dari hasil-hasil penelitian sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab yang lalu, maka dapat ditarik kesimpulan hal sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan PAD Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 887.877.189.418,27 dibandingkan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 619.173.437.390,00. Hal ini menunjukkan bahwa PAD Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan.
2. Berbagai target PAD yang ditetapkan tahun 2013 mengalami peningkatan seperti dalam sektor Pajak Daerah realisasi sebesar Rp 725.464.224.225,00 dari target Rp 683.970.800.000,00, Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp 83.992.026.667,00 dari target Rp 76.393.766.500,00, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan realisasi sebesar Rp 12.137.115.821,62 dari target Rp 11.958.810.389,00, dan terakhir Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasi sebesar Rp 66.283.822.704,65 dari target Rp 39.763.336.100,00
3. Realita kondisi pendapatan daerah di Provinsi Lampung selama tahun anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2013 menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari dukungan dan koordinasi semua pihak yang terkait

dengan proses pengelolaan Pendapatan Daerah di Provinsi Lampung.

1.1 Saran-saran

1. Pelayanan yang masih dirasakan oleh masyarakat wajib pajak, terutama wajib pajak pemilik kendaraan bermotor terasa masih kurang memuaskan sebagaimana yang terjadi dikantor-kantor Samsat yang ada.
2. Secara terus-menerus SDM aparatur Dispenda terutama UPT yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus selalu ditingkatkan dalam hal pengelolaan PAD dan pelayanan. Hal ini diperlukan untuk meminimalisir keluhan-keluhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan.
3. Pelaksanaan pungutan pos-pos penerimaan pendapat daerah di Provinsi Lampung memerlukan koordinasi yang mantap dengan berbagai pihak utamanya Dinas/Instansi/Lembaga Pengelola Pendapatan Daerah serta Dinas Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- J.B. Kristiadi, 2005. *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*. Prisma. Jakarta.
- Josef Riwu Kaho. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*. Rajawali. Jakarta.
- Kartono Kartini, 2003. *Pengantar Metodologi Research*. Alumni, Bandung.
- Kunarjo, 2003. *Perencanaan dan Pembiayaan Pembangunan*. UI-Press : Jakarta.
- Amrah Muslimin. 1986. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Alumni. Bandung
- Rachmat Soemitro. 1999. *Pajak-pajak Indonesi..* Yayasan Bina Pajak. Jakarta.
- Rozali Abdullah. 2004. *Pelaksanaan Otonomi Luas*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sugiono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Santoso Brotodiharjo. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. PT. Asco. Jakarta.
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Bawah Tanah (P3PABT)
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan/Pemanfaatan Air Permukaan (P3AP)
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUAM
- Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No.59 Tahun 2007 Tentang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan